

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada Tahun 1999 melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memiliki agenda yang sangat krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tingginya ketimpangan pembangunan yang terjadi di Wilayah Barat dengan Wilayah Timur Indonesia sebagai dampak penerapan pemerintahan sentralistik di era Orde Lama dan Orde Baru menjadi dasar bagi Pemerintah di Era Reformasi untuk memberikan tatanan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, secara bertahap penyelenggaraan Pemerintahan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdasarkan pada prinsip otonomi masing-masing daerah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999, ternyata belum mampu memberikan solusi yang optimal bagi berkurangnya ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia, dalam pelaksanaannya antara Tahun 2000 hingga 2008, tingkat kemiskinan masih berada di atas 15 persen (Badan Pusat Statistik, 2021) yang mengindikasikan kurang efektifnya amanat-amanat dalam UU tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah melakukan pembenahan yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sekaligus mencabut UU No. 22 Tahun 1999.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan arah baru dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia, jika sebelumnya

pembangunan daerah belum secara konkret menggunakan Desa sebagai subyek sekaligus objek pembangunan, pada UU ini secara tegas disebutkan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk desa, sehingga saat ini Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

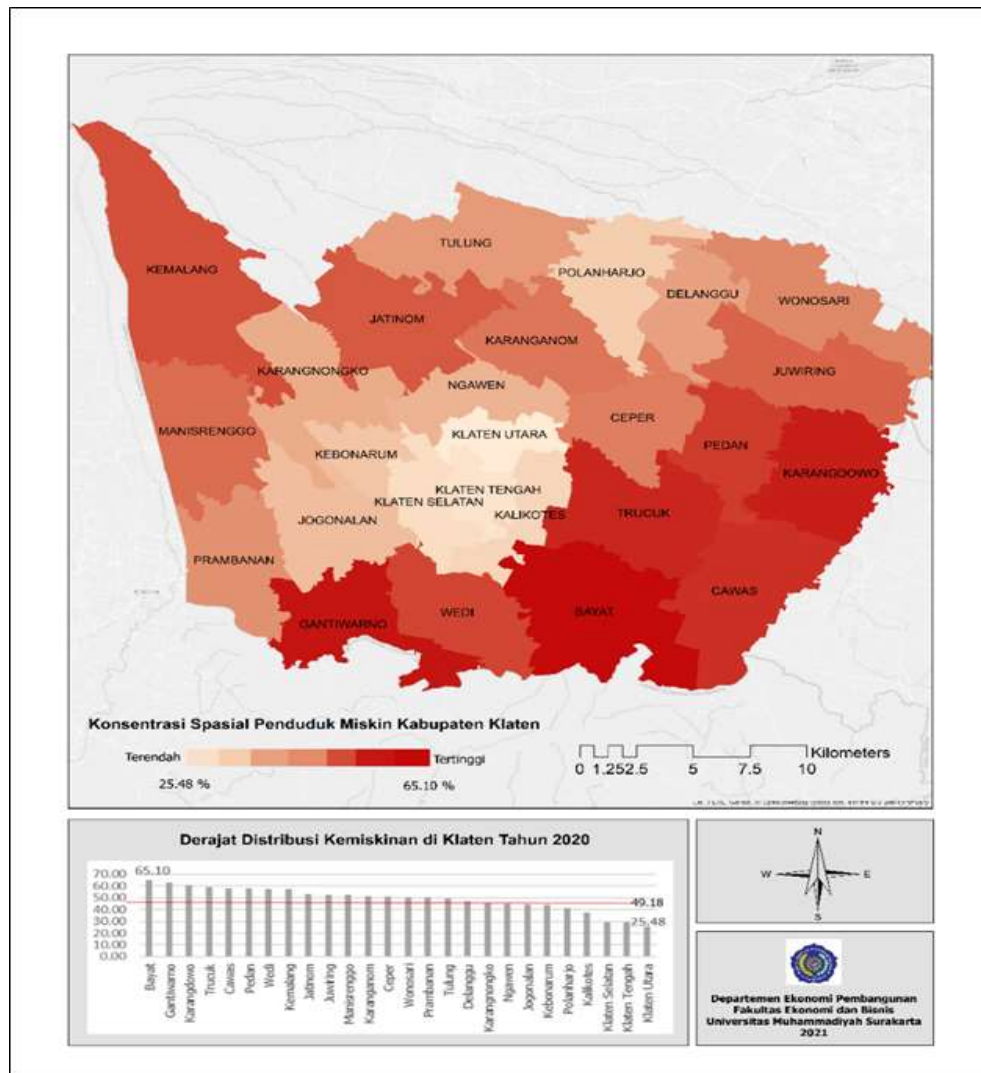
Melengkapi UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan pula UU No.6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, di mana dalam Pasal 72 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa berwenang menyelenggarakan pembangunan dengan pemanfaatan secara optimal Dana Desa. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan di tingkat desa, sehingga Pemerintah Pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mendasarkan pada UU ini pula, diamanahkan bahwa Pemerintah Desa memiliki kuasa terhadap pengelolaan pendanaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya yang paling sesuai, di mana tujuan akhirnya adalah berkurangnya ketimpangan daerah karena masing-masing Desa telah mampu meningkatkan pertumbuhannya berdasarkan potensi asli yang dimiliki, Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan dana desa, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana,

serta dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Secara detail sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi dan tujuan dana desa adalah untuk: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut dimaknai sebagai tercapainya kemandirian wilayah desa yang tujuan utamanya adalah tercapainya pengelolaan desa yang berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Kemandirian wilayah sebagai konsep pertumbuhan wilayah di Indonesia teridentifikasi melalui Indeks Desa Membangun (IDM), di mana IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen dasar yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Dengan adanya IDM, gambaran perkembangan kemandirian desa dapat terlihat dan dapat digunakan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang tepat dari pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektivitas program desentralisasi fiskal melalui Dana Desa dengan pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten yang secara spasial terletak di batas koridor pembangunan wilayah Jawa Tengah dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana ditemukan ketimpangan dan sebaran masyarakat miskin yang cukup tinggi diantara wilayah-wilayah di Kabupaten Klaten. Masalah kemiskinan dan ketimpangan inilah yang menjadi fokus pemerintah dalam penerapan kebijakan dana desa dengan

tujuan utamanya adalah tercapainya kemandirian dan pembangunan daerah dengan menciptakan pertumbuhan wilayah dan mampu mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah masing-masing.



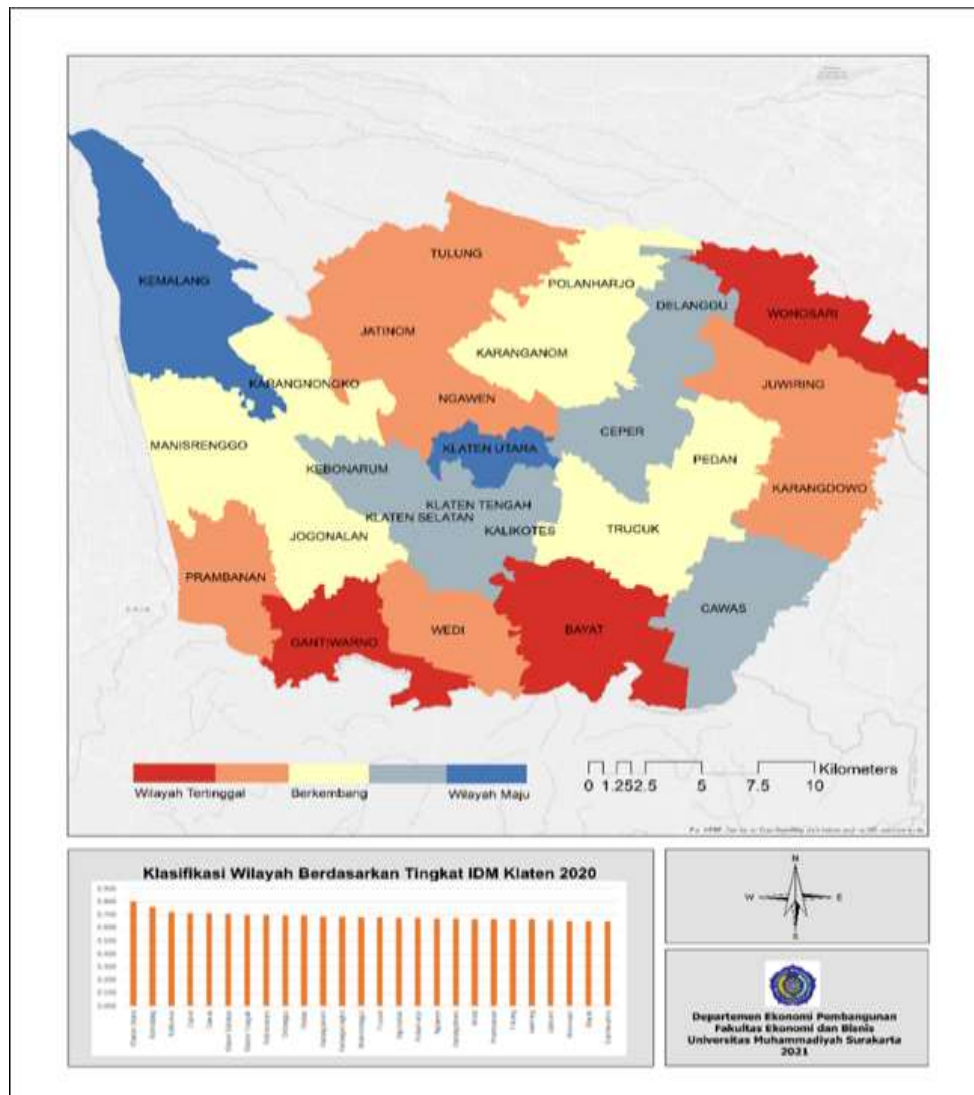
Gambar 1. 1 Distribusi Spasial Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020
Sumber: Kemensos, BPS Kabupaten Klaten, 2020. (diolah)

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa sebaran kemiskinan Kabupaten Klaten sebagaimana penduduk miskin Klaten terkonsentrasi di bagian selatan dan barat yang berbatasan langsung dengan jajaran pegunungan seribu di Wilayah Sukoharjo dan Gunungkidul, kemudian semakin berkurang jika ditarik arah kepusat kota,

sehingga wilayah di Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kecamatan Kalikotes memiliki jumlah penduduk miskin yang rendah. Hal ini terjadi karena wilayah Barat Klaten seperti Bayat, Gantiwarno dan sekitarnya merupakan wilayah yang didominasi oleh pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama penduduknya (Klaten dalam Angka, 2020). Sedangkan wilayah tengah Klaten yang terletak disebanjang koridor jalan utama penghubung Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh sektor perdagangan, jasa dan pemerintahan, sehingga memunculkan jarak atau perbedaan pendapatan yang cukup tinggi diantara wilayah ini.

Perkembangan wilayah sebagai capaian pembangunan wilayah regional melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) No. 2 Tahun 2016 direperenstasikan dalam Indek Desa Membangun (IDM) yang merangkum perkembangan wilayah berdasarkan komponen ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan atau ekologi, mendasarkan indikator ini suatu wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah mandiri (sembada), maju (pra-semabada), berkembang (madya), tertinggal (pra-madya) dan wilayah sangat tertinggal. Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.2, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Klaten dalam agregat kecamatan terkategori dalam kelompok wilayah berkembang (madya), dan hanya dua Kecamatan yang terklasifikasi dalam ketegori maju yaitu Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Klaten Utara. Kedua wilayah ini memiliki potensi yang cukup berbeda, di Kemalang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan wilayah ditopang melalui sektor

penggalan serta pariwisata, sedangkan Klaten Utara yang merupakan sentra aktivitas dan pusat pemerintahan ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan.



Gambar 1. 2 Klasifikasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Klaten Tahun 2020
Sumber: Kemensos, BPS Kabupaten Klaten, 2020. (diolah)

Otonomi daerah sebagai strategi dalam mencapai kemajuan wilayah memerlukan instrumen yang berperan sebagai penggerak kegiatan ditingkat daerah, selain pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa sebagai instrumen penggerak kegiatan-kegiatan pembangunan di level regional, yang

Undang Nomor 6 Tahun 2014, perbedaan penerimaan Dana Desa tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian kelompok wilayah di mana semakin maju wilayah yang berarti wilayah tersebut semakin mandiri maka penerimaan Dana Desanya akan semakin sedikit, dan berlaku pula kebalikannya.

Mendasarkan pada beberapa hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat efektivitas kebijakan Dana Desa terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Klaten, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel pada 26 Kecamatan yang diamati selama kurun waktu 5 tahun, sehingga diharapkan dapat menemukan hubungan antara pemberlakuan Dana Desa terhadap kemajuan suatu wilayah yang terwakili oleh Indeks Desa Membangun.

B. Perumusan Masalah

Pembangunan wilayah dapat dinilai dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Kontribusi dari Dana Desa dalam pembangunan wilayah di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten ada beberapa yang belum maksimal. Maka, diperlukan analisis untuk mengetahui persebaran Indeks Desa Membangun di Kabupaten Klaten.

Nilai Dana Desa di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi dan menurun drastis pada tahun 2019 karena adanya pemilu legislatif dan membuat pengelolaan Dana Desa dialokasikan sebagian untuk penyelenggaraan kepentingan politik. Di sisi lain, Dana Desa mampu meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun tahun 2016-2020 sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan ulasan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana dampak Dana Desa terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat persebaran Dana Desa dan Indeks Desa Membangun dan mengestimasi pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terusunnya hasil riset tentang hubungan Dana Desa bagi pertumbuhan wilayah, di mana hasil tersebut berguna bagi Pemerintah Daerah untuk melihat efektivitas program pembangunan wilayah berbasis Dana Desa di Kabupaten Klaten.

E. Metode penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel pada 26 kecamatan di Kabupaten Klaten dalam rentang waktu 5 tahun sehingga model ekonometrika dalam penelitian ini ditulis sebagai berikut:

$$IDM_{it} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 \log (DD)_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

IDM = Indeks Desa Membangun

DD = Dana Desa

i = Kabupaten atau Kota ke- i (*cross section*)

t	= Tahun (<i>time series</i>)
$\widehat{\beta}_0$	= Konstanta
$\widehat{\beta}_1$	= Koefisien Regresi
$\hat{\varepsilon}$	= <i>Error Term</i> (faktor kesalahan)
\log	= Operasi logaritma

E.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Dana Desa tahun 2016-2020, data IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2016-2020, jumlah penduduk total tahun 2020, dan jumlah penduduk miskin tahun 2020 di Kabupaten Klaten. Data tersebut diperoleh dari Sistem Informasi Desa (Kemendesa), Indeks Desa Membangun (IDM), Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik.

F. Sistematika pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori –teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok bahasan yang akan dijelaskan, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang objek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penulis juga melakukan analisis data yang disertai pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang berupa masukan yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**